

Media Sosial dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z

Nuryadi Kadir¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

This paper examines the political dynamics of Millennials and Generation Z (Gen Z). The demographic structure shows that they belong to a fairly large population. The presence of Millennials and Gen Z is accompanied by the development of information technology, so it is dubbed as Digital Native. Being active on various digital platforms and social media channels is a reflection of his life. Social learning is obtained through these channels, generating expression and criticism of political dynamics. Still apathetic and skeptical of the world of politics. His perception is part of public opinion that transmits to social media (as the embodiment of public space). Therefore, what is the formulation in this paper, first, what is the form of political participation in the era of increasing the number of Millennial and Gen Z votes? Second, how social media as a public space engagements its behavior and political preferences. The goal is to describe the phenomenon that occurs on social media and the political participation of Millennials and Gen Z. The results of the discussion first, examine the development of democracy through the Indonesian Democracy Index which has decreased from 2019 which has an impact on the problem of declining the quality of democracy in aspects of political rights and civil liberties. Second, the problem of social media and democratization is marked by the overflow of information that presupposes the growth of hoax practices that target Millennial and Gen Z users and have the potential to be exposed due to disinformation and hoaxes. On the one hand, there is no guarantee of protection and the creation of a sense of security from the government against the use of social media. Third, egalitarian participatory politics are the hope of Millennials and Gen Z, can determine or have an attitude towards politics and refuse to be part of a political power scenario or be used as a political commodity. Fourth, Millennials and Gen Z have political reasoning, but the forms of participation vary. In fact, some Millennials become election activists and try to reflect on their political experience and moderate supervisory participation, including taking the role of reducing the risk and potential of fraud and fifth, the political literacy ability of every citizen, especially Millennials and Gen Z, can build a healthy political culture and discourse in order to create a dignified political system.

Keywords : Politics, Social Media, Demographics and Millennial Democracy

Abstrak

Tulisan ini mengkaji dinamika politik Kaum Milenial dan Generasi Z (Gen Z). Struktur demografi menunjukkan bahwa mereka tergolong populasi cukup besar. Kehadiran Kaum Milenial dan Gen Z dibarengi dengan berkembangnya teknologi informasi, sehingga dijuluki sebagai Digital Native. Aktif di berbagai platform digital dan kanal media sosial merupakan cerminan kehidupannya. Pembelajaran sosial didapatkan melalui kanal tersebut, menghasilkan ekspresi dan kritik terhadap dinamika politik. Masih bersikap apatis dan

¹nkadir110384@gmail.com

skeptis terhadap dunia politik. Persepsinya merupakan bagian dari opini publik yang transmisi ke media sosial (sebagai perwujudan ruang public). Maka dari itu yang menjadi rumusan dalam tulisan ini, pertama bagaimana bentuk partisipasi politik di era meningkatnya jumlah suara Kaum Milenial dan Gen Z? Kedua, bagaimana media sosial sebagai ruang publik yang me-engagement perilaku dan preferensi politiknya. Adapun tujuannya adalah mendeskripsikan fenomena yang terjadi media sosial dan partisipasi politik kaum Milenial dan Gen Z. Adapun hasil pembahasannya pertama, menelisik perkembangan demokrasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan dari tahun 2019 yang berdampak pada persoalan menurunnya kualitas demokrasi pada aspek hak politik dan kebebasan sipil. Kedua, problem media social dan demokratisasi ditandai melubernya informasi yang berpretensi tumbuhnya praktek hoaks yang menasar kepada pengguna Milenial dan Gen Z dan berpotensi terpapar akibat disinformasi dan hoaks. Satu sisi, tidak adanya jaminan perlindungan dan penciptaan rasa aman dari pemerintah terhadap penggunaan media sosial. Ketiga Politik partisipatif yang egaliter menjadi harapan Kaum Milenial dan Gen Z, dapat menentukan atau punya sikap terhadap politik dan menolak menjadi bagian dari skenario kekuasaan politik atau dijadikan sebagai komoditas politik. Keempat, Kaum Milenial dan Gen Z memiliki nalar politik, tetapi bentuk peran sertanya berbeda-beda. Faktanya sebagian Kaum Milenial menjadi penggiat Pemilu dan berusaha merefleksikan pengalaman politiknya dan melakukan moderasi partisipasi pengawasan, termasuk mengambil peran mengurangi resiko dan potensi kecurangan dan kelima, kemampuan literasi politik dimiliki setiap warga khususnya Kaum Milenial dan Gen Z dapat membangun kultur dan diskursus politik yang sehat agar terciptanya sistem politik yang bermartabat.

Kata Kunci : Politik, Media Sosial, Demografi dan Demokrasi Millenial

Pendahuluan

Pemilu tahun 2024 boleh dibilang menarik, pasalnya partisipasi pemilih nantinya didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z (Gen Z). Persentase populasi mereka tergolong besar dalam struktur demografi di Indonesia. Gen Z yang lahir di sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 misalnya, ada sekitar 27,7 % dari populasi penduduk. Selanjutnya, populasi Kaum Milenial yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 1996, ada sekitar 25,8 % dari total populasi penduduk Indonesia (BPS 2020). Struktur demografi di Indonesia mengalami perubahan secara signifikan selama dua dekade ini menjelang bonus demografi di tahun 2045. Kehadiran Kaum Milenial dan Gen Z dibarengi dengan era disrupsi teknologi informasi. Era yang dimaknai sebagai perubahan fundamental akibat berkembangnya sistem teknologi. Orang yang lahir pada masa berkembangnya

teknologi digital yang ditandai dengan melubernya informasi dan massifnya pemanfaatan ruang virtual.

Media sosial merupakan varian teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana interaksi dan pertukaran informasi yang hilir mudik, sehingga menjadi magnet tersendiri bagi Kaum Milenial dan Gen Z (Saputro, 2022 : 62-64). Mereka juga selalu diidentikkan sebagai generasi atau kelompok “digital native” yang sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi, cepat beradaptasi dan merasa nyaman menggunakan segala macam alat digital. Media sosial pun sangat digandrungi oleh Kaum Milenial dan Gen Z dalam membagikan berbagai bentuk ekspresinya, percakapan, pengalaman dan aktivitasnya. Akan tetapi, dibalik kegandrungannya, masih menyisakan persoalan terkait daya saing dan partisipasinya dalam pembangunan demokrasi. Satu sisi potensi populasinya yang menjadi peluang melahirkan generasi tangguh, berdaya saing dan berkontribusi pada kemajuan demokrasi, tetapi disisi lain, generasi ini akan menimbulkan masalah kependudukan sehingga perlu mendapatkan porsi dan perhatian sebesar-besarnya dalam kebijakan pembangunan strategis dalam memajukan demokrasi kebangsaan.

Setiap negara mengalami fase krusial akibat perubahan struktur demografi yang berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan (Kurniati dan Sugianto, 2021: 42-44). Pada bidang sosial ekonomi misalnya, mereka akan menjadi kelompok produktif (angkatan kerja), sedangkan bidang politik menunjuk besaran tren pemilih pada momen Pemilu. Sehubungan dengan itu, kehadiran Kaum Milenial dan Gen Z dalam proses politik dan demokratisasi dewasa ini, masih pahami sebagai ornamen politik yang suaranya berpotensi dikapitalisasi dalam kemenangan Pemilu atau kehadirannya bersifat komplementer dalam setiap momentum politik kontestasi. Padahal suara kelompok pemilih umur 17-35 mencapai 55% pada Pemilu tahun 2019 (Survei Saiful Mujani Riset Consulting tahun 2019).

Sedangkan menurut Kaum Milenial dan Gen Z sendiri, berpandangan bahwa politik itu sarat dengan berbagai kepentingan, menggunakan praktek politik instan. Sebagian pula berpendapat bahwa aktor dan elit politik masih didominasi oleh

kelompok konservatif dengan kerja politik yang konvensional, tidak memiliki inovasi dalam dunia perpolitikan dan hanya sekedar melanggengkan kekuasaan. Desain kontestasi yang ditawarkan hanya berpikir menang dan kalah.

Sikap apatis dan skeptis terhadap dunia politik sehingga membuat mereka apolitis sebagai bentuk kritik terhadap politik. Harus diakui bahwa keberadaan Kaum Milenial dan Gen Z dalam mewarnai dinamika kehidupan politik berbangsa dan bernegara belum bereputasi dikarenakan wacana visi pembangunan demokrasi belum berpihak kepadanya. Kebijakan dan program strategis pemerintah belum menjadikan kelompok tersebut sebagai faktor utama dalam pembangunan.

Keberadaan Kaum Milenial dan Gen Z masih sangat dipengaruhi oleh lompatan teknologi bahwa kehidupan dan berkat penguasaan serta kecakapan terhadap teknologi menjadi modal budaya dan keterampilan yang selama ini, yang notabene belum direspon dan disoroti secara berkelanjutan. Saat ini, pemerintah telah memfasilitasi Kaum Milenial dan Gen Z, memberi peluang dan mengambil bagian di dalam lembaga publik (contoh staff khusus kepresidenan), tetapi hanya segelintir yang terberdayakan dan mendapatkan keistimewaan (*privilege*) jika dibanding dengan banyaknya jumlah Kaum Milenial dan Gen Z.

Pada dimensi lain, semangat demokrasi melebar dari ranah ruang publik ke ranah ruang virtual. Terminologi ruang publik mengalami transformasi yang tidak lagi dikonsepsikan hanya sebagai ruang dimana warga bertemu secara fisik dan berinteraksi, namun sudah beralih ke ruang virtual dalam bentuk ekspresi pesan kepada netizen. Kemunculan ruang publik virtual cukup mengintensifkan proses demokratisasi yang melahirkan revolusi politik dan tidak sedikit merubah tatanan demokrasi.

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Pada tahun 2014 merilis riset yang bertajuk *Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena “Arab Spring”* dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional oleh Umar, Ahmad. R Mardhatillah dkk (2014) yang mengulas bagaimana ruang publik dan aktivisme transnasional melalui media sosial di Timur Tengah yang menyebabkan terjadi gelombang revolusi di timur tengah yang disebut Gelombang Arab Spring. Selanjutnya, perkara Brexit juga menegaskan peran media sosial dalam merubah

situasi politik, sampai pada kampanye media sosial yang memenangkan kandidat presiden di beberapa negara.

Kanal media sosial secara fundamental membuka jalinan komunikasi secara luas, pertautan informasi, media interaksi yang mendorong kebebasan individu dalam menyampaikan ide, gagasan dan ekspresinya di ruang publik virtual. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pertukaran informasi di ruang publik virtual tidak melulu berkaitan dengan wacana kepublikan atau berkaitan dengan politik. Terkadang ada hal-hal yang bersifat privat melintas di kanal media sosial.

Dalam arena politik dan media sosial, Kaum Milenial dan Gen Z mencuri perhatian, sebab kemampuan dan keluwesannya dalam mengakses informasi. Keterampilan dalam memainkan, menangkap dan mentransmisi opini di kanal media sosial cukup handal. Mampu mempopulerkan tren gaya hidup, menviralkan percakapan, dapat memassifkan budaya pop dan punya karakter apolitis yang terfragmentasi dalam bentuk ekspresi di media sosial.

Fenomena influencer atau figur dalam media sosial meng-engage dari dunia marketing ke dunia politik. Relasi influencer yang dipertautkan dengan para follower menjadi akses masuk ke dunia politik di media sosial. Maka tidak salah kemudian influencer dimanfaatkan oleh sebagian partai politik dalam menjalankan agenda politiknya. Partai mengendorse seorang influencer dalam menggaet Kaum Milenial dan Gen Z. Oleh karena itu, partai mengambil peran aktif di dalam dunia digital dengan mengusung jargon politik yang kekinian, akrab dengan Kaum Milenial dan Gen Z.

Berdasarkan uraiannya diatas, maka tulisan ini mencoba menganalisis suatu gejala fenomena sosial yang terjadi dewasa ini, khususnya terkait dengan media sosial sebagai pengejawantahan ruang publik yang pertautkan dengan dengan fenomena demografi (Milenial dan Gen Z) sekaitan digital native dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini banyak mengamati fenomena Kaum Milenial dan Gen Z dari kacamata sosiologi politik. Sehingga yang akan dicapai dari tulisan ini menghasilkan suatu dialektika pemikiran dengan menilik, pertama bagaimana bentuk partisipasi politik di era meningkatnya jumlah suara

Kaum Milenial dan Gen Z, kedua bagaimana media sosial sebagai ruang publik yang me-engagment perilaku dan preferensi politiknya. Adapun tujuannya adalah mendeskripsikan secara kualitatif fenomena yang terjadi media sosial dan partisipasi politik kaum Milenial dan Gen Z.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian literatur review dengan metode sistematis, eksplisit dan reproduibel dengan mengidentifikasi, melakukan evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah diteliti. Selanjutnya data yang dikumpulkan dan diambil dari jurnal ilmiah, sumber buku (ebook) yang berkaitan penelitian, catatan artikel dan opini media yang berkaitan dengan kajian sosiologi politik dan demokrasi.

Tulisan ini menfokuskan pada kajian media sosial, demografi, partisipasi politik kaum Milenial dan Gen Z dalam dinamika demokrasi. Dalam perspektif Sosiologi Politik dan Demokrasi mengajak kita menyelami bagaimana relasi masyarakat dan negara yang domainnya berada pada analisis dinamika hubungan kekuasaan dan kewenangan di dalam suatu negara. Tulisan ini memuat analisis dinamika demokrasi, kekuasaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang meliputi struktur sosial, agama, ekonomi, kelas sosial, kelompok kepentingan (media) serta sistem nilai dan kepercayaan.

Hasil dan Pembahasan

A. Demokrasi dan Pembangunan Politik Kaum Milenial dan Gen Z

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Kualitas demokrasi semakin menurun sejak tahun 2019. Penurunan Indeks demokrasi mengindikasikan ada fenomena politik dan demokrasi yang menggejala, mulai dari mekanisme atau proses demokrasi elektoral yang terjadi mengalami kecacatan. Dengan kata lain Pemilu yang diselenggarakan belum melahirkan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat. Respon dan sikap pemerintah dalam menata demokrasi dinilai lamban, hanya menyadari bahwa peran pemerintah sebagai penyelenggaraan birokrasi, bukan fasilitator demokrasi. Melakukan dan

menjalankan pembangunan secara instrumentatif dengan pola teknokratis yang cenderung mengabaikan diskursus politik dan kebebasan sipil.

Berikut ini Tabel Indeks Demokrasi Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2020 :

Tabel 3.1
Indeks Demokrasi Indonesia

Aspek	2018	2019	2020
Aspek Kebebasan Sipil	78,46	77,2	79,4
Aspek Hak Politik	68,79	70,71	64,99
Aspek Lembaga Demokrasi	79,75	81,34	70,77

Sumber : Data BPS 2022

Indeks Demokrasi Indonesia dan Laporan Demokrasi 2021 menunjukkan bahwa terjadi pasang surut secara signifikan dari aspek hak politik dan lembaga demokrasi. Hal yang paling signifikan adalah menurunnya indeks pada aspek hak politik yang berada pada 64.99 pada tahun 2020. Penurunan yang terjadi akibat adanya pergeseran pola demokrasi di Indonesia. Fenomena pandemi Covid-19 berdampak pula pada kualitas demokrasi, seperti rendahnya dan lambannya pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19. Penanganan Covid-19 belum optimal menimbulkan penilaian masyarakat bahwa perlindungan yang diamanatkan oleh Undang-undang tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.

Selanjutnya, gejala pandemi Covid-19 memberikan peluang seluas-luasnya oleh seluruh pihak untuk beralih pola interaksi sosial dari interaksi yang secara fisik (tatap muka) menjadi interaksi melalui kanal platform digital dan media sosial. Pembatasan sosial meniscayakan semua orang untuk mengakses internet atau ruang virtual yang disatu sisi dengan harapan mengurangi resiko penyebaran Covid-19, dan disisi lain untuk tetap mengintensifkan dan mengefektifkan komunikasi antar sesama warga. Massifnya penggunaan dan pemanfaatan kanal media sosial sebagai wadah pertukaran informasi dan komunikasi oleh warga (netizen), tidak lantas terbebas dari disinformasi. Pemanfaatan kanal media sosial membuka peluang melubernya informasi yang berpretensi pada praktek hoaks. Peralihan secara massif tidak dibarengi edukasi dan literasi media sehingga menimbulkan resiko kekacauan informasi, terkadang para pengguna harus melakoni diri menjadi sarkasme

(menyebarkan narasi deskruktif), saling menyerang (terror meneror) dan menyebarkan fitnah dan intimidasi antar sesama pengguna.

Problem utama dari hoaks ialah rentannya pengguna aktif media sosial, bisa menysar pada kelompok seperti kaum Milenial dan Gen Z yang sebagian besar aktivitasnya di media sosial. Data menunjukkan bahwa 60% orang Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui medial sosial. Sementara itu, 21% sampai 36% saja yang mampu mengenali indikasi berita hoaks (Katadata Insight Center tahun 2020). Menanggapi fenomena tersebut, terkadang pemerintah mengambil sikap dengan membatasi informasi padahal tidak semua informasi mengandung unsur hoaks. Sese kali menggunakan cara refresif, menggunakan pendekatan yang berdampak pada masalah kebebasan sipil. Harapan dari problem kebebasan sipil pada pengguna media sosial adalah bagaimana pemerintah memberikan payung hukum dan perlindungan, jaminan kebebasan dan memberikan rasa aman dalam menggunakan segala produk digital informasi.

Selanjutnya, pembangunan politik yang berfokus pada kaum Milenial dan Gen Z tidak kongkrit pada tataran teknis. Peta jalan pendidikan politik bagi kaum Milenial dan Gen Z belum berbasis pada semangat emansipatif dan belum meneguhkan prinsip-prinsip egaliter dalam suatu tatanan kelembagaan politik, seperti kaderisasi partai hanya menciptakan relasi kuasa antara kader senior-junior. Keberadaannya pun masih dipandang sebagai ornamen politik, dengan besarnya potensi suara yang cenderung dikapitalisasi untuk memenangkan kontestasi, masih dimaknai sesuatu hal yang bersifat komplementer.

Selain itu, diskursus politik yang ditawarkan kurang mengikuti selera dan habitat kaum Milenial dan Gen Z. Fenomena politik lebih banyak mempertontonkan praktek atau pertunjukan politik yang kurang sedap (tidak bijak dan terkadang barbar), seperti pelemahan terhadap posisi kelompok oposisi yang dimana bergabungnya sejumlah partai dalam kabinet pemerintahan yang menyebabkan rendahnya fungsi kontrol (check and balances) terhadap berjalan pemerintahan. Sisi penegakan dan supermasi hukum saat ini tergolong lemah, kasus korupsi dan penyelewengan anggaran, kasus pelanggaran terkait Undang-undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) menambah masalah atas ketidakpercayaan Kaum Milenial dan Gen Z terhadap perbaikan kualitas demokrasi.

Fakta lainnya seperti politik kontestasi antar elemen politik (partai politik) yang saling menjatuhkan kandidat, praktek pencekalan kandidat, monopoli beberapa partai terhadap satu calon dan sebagainya. Dominan memainkan arus politik yang berkenaan dengan praktek elektoralisme, diantaranya menjadikan kontestasi politik sebagai ajang tarung menjagokan kandidat, terhanyut pada drama politik yang penuh intrik dan akhirnya larut dalam pilihan antara menang dan kalah. Kemasan politik terkesan eksklusif yang hanya boleh diperbincang oleh sekelompok kekuasaan tertentu dan selebihnya memobilisasi kapital dan massa.

Gejala demikian menjadi semacam tradisi, berbentuk warisan politik yang akan diterima oleh kaum Milenial dan Gen Z sebagai penerus dan pelanjut tongkat estafet demokrasi. Keperihatinan tersebut dialami oleh kaum Milenial dan Gen Z sehingga tidak salah mereka masih bersikap apatis dan skeptis terhadap dunia politik. Adapun diantaranya yang tergabung atau telah berafiliasi pada suatu partai, karena mereka memiliki akses politik, memiliki keistimewaan (privilege) seperti bagian dari dinasti atau trah politik. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan sipil dan penggunaan hak politik bagi kaum Milenial dan Gen Z masih merupakan barang yang langka, karena sudah dikenalkan dengan realitas politik yang sarat dengan berbagai kepentingan.

B. Ruang Publik dan Media Sosial sebagai Arena Politik.

Seyogyanya ruang publik harus menjadi ruang bagi semua kalangan, menjadi zona yang nyaman bagi setiap orang untuk bertemu dan mengutarakan kegelisahan sekaitan fenomena kepublikan dari berbagai sudut pandang. Konsep ruang publik menurut Jurgen Habermas (2010 : 41) adalah sebagai ruang privat yang datang bersama sama dengan publik, dengan kata lain tempat individu berkumpul bersama dan mengartikulasikan kebutuhan bersama dengan pemerintah. Ruang tersebut dianggap sebagai milik publik yang tidak diatur oleh negara atau pemerintah sebagai bentuk kewenangan publik. Ruang publik merupakan pengejawantahan rasionalitas publik dalam ruang-ruang artikulasi yang tersedia di masyarakat.

Menghadapi hajatan politik, ruang publik terkadang mengalami kebisingan dengan berbagai sudut pandang dan komentar yang bersifat deskruktif. Media sosial sebagai perwujudan konsep ruang publik virtual yang dimanfaatkan oleh semua orang, tidak terkecuali kaum Milenial serta Gen Z yang terlibat dalam adu narasi. Narasi politik yang hanya menawarkan citra, sensasi dan selebrasi, merupakan panorama aktivitas ruang public virtual. Kasus perdebatan di kanal-kanal media rata-rata membahas hal yang bersifat elementer dan instrumental seperti kritik yang membabi buta, mengomentari hal yang tidak berkorelasi dengan nalar publik, terkadang melakukan kekerasan simbolik dan terjadi perdebatan yang jauh dari hal yang substansial.

Ketidaktersterilan wacana dan percakapan politik dalam media sosial, membuat sebagian warga (netizen) sulit mengidentifikasi, mengorganisir wacana atau isu kolektif sehubungan semangat kepublikan. Diskursus dan kebebasan mengorganisir opini, melawan hegemoni wacana dominan yang rereproduksi oleh kelompok tertentu menjadi terhambat oleh keberadaan UU ITE. Instrumen hukum seperti UU ITE hanya dijadikan alat hukum atau cara mengebiri kebebasan berpendapat seseorang, faktanya beberapa kasus sesama netizen saling melaporkan atas dasar pelanggaran UU ITE.

Fenomena buzzer semakin memperkeruh ruang publik virtual. Buzzer menjadi bumper politik dari suatu rezim yang berkuasa dengan melakukan propaganda isu kepentingan melanggengkan kekuasaan. Kecakapan dalam mengelola isu dan wacana yang menguntungkan rezim kekuasaan. Didukung dengan perangkat teknologi, tim kerja (kelompok intelektual) dan kanal, yang paling utama adalah narasi yang terstruktur dalam membolak-balikkan persepsi netizen.

Percakapan politik seharusnya akrab dengan wacana kepublikan agar menjadi representasi dan medium komunikasi politik. Ruang publik virtual sebagai arena inklusif memungkinkan terciptanya ekspresi dan ekspektasi publik. Hadirnya partisipasi yang egaliter, tatkala setiap warga negara menyadari betul dirinya sebagai aktor yang menentukan proses politik ke depan, Kaum Milenial dan Gen Z adalah bagian dari dinamika yang dimaksud, bahwa masing-masing dapat

menentukan atau punya sikap terhadap politik ke depan. Tidak hanya menjadi bagian dari skenario kekuasaan politik atau dijadikan sebagai komoditas politik.

Diskursus Kaum Milenial dan Gen Z terhadap politik, membicarakan sesuatu hal yang menyangkut diri dan lingkungannya, menyentuh langsung dengan kehidupannya atau merumuskan persoalan yang paling elementer sekaitan dengan pemenuhan kebutuhan hak dasarnya, seperti jaminan pendidikan, jaminan memperoleh layanan terkait kepemudaan, memperoleh fasilitas pengembangan diri, jaminan perlindungan dari kebebasan ekspresi, adanya jaminan dukungan terhadap pilihan hidup kaum Milenial dan Gen Z.

C. Literasi Politik terhadap Kaum Milenial dan Gen Z

Literasi politik merupakan keniscayaan, merupakan tanggung jawab setiap warga negara dalam memahami politik dan keberlangsungan demokrasi. Literasi politik tidak hanya sekedar memberikan pemahaman terkait tahapan dan mekanisme pemilihan. Namun memberikan ruang dalam bentuk penyadaran terhadap dampak apa yang akan diperoleh saat menjatuhkan pilihan politiknya. Kaum Milenial dan Gen Z menjadi titik sentral dalam penentuan kualitas politik dan demokrasi di Indonesia. Kemampuan literasi politik dimiliki, menjelma kritis terhadap pilihan politiknya.

Ada empat sumber referensi yang membentuk persepsi politik Kaum Milenial dan Gen Z, yaitu media sosial, keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pertemanan. Literasi politik menjadi pedoman (*guidance*) pembentukan nilai pengetahuan politik seseorang diantaranya, pertama kemampuan dalam menganalisis pilihan politiknya, kedua memahami secara sadar akan hak-hak politiknya, ketiga mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi, keempat ikut terlibat dalam diskursus politik.

Sehubungan dengan literasi politik di ruang publik virtual, ada indikasi bahwa pemanfaatan teknologi informasi seperti akses internet yang tersebar ke seluruh pelosok daerah, belum diiringi dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengolah informasi dan berpikir kritis. Perlu diketahui bahwa ada korelasi positif antara literasi dengan kemampuan seseorang mengenali atau

mengidentifikasi informasi berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin dan tempat tinggal.

Pada umumnya pencarian dan penyebaran informasi di media sosial, dominan isu politik, kesehatan dan agama. Isu tersebut terkadang memancing sentimen antar netizen sehingga praktek polarisasi, politik identitas, pemelintiran isu dan penistaan serta kekerasan simbolik dalam politik sering terjadi dijagat media sosial. Oleh karena itu literasi politik menjadi opsi mengurangi gejolak yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 masih merujuk pada UU No.7 Tahun 2017 sehingga reformulasi, model literasi memungkinkan dikembangkan, karena lanskap Pemilu masih sama dengan Pemilu tahun 2019. Inovasi kepemiluan terkini, maraknya kelompok penggiat Pemilu yang rata-rata digawangi oleh Kaum Milenial. Sesungguhnya mereka memiliki nalar politik, tetapi bentuk peran sertanya berbeda-beda. Kontribusi mereka sebetulnya lebih merefleksikan pengalaman politik di Indonesia dan melakukan moderasi partisipasi pengawasan, termasuk mengambil bagian dalam mengurangi resiko kecurangan dalam Pemilu.

Perangkat penyelenggara dan pengawasan Pemilu sudah dimaksimalkan melalui peraturan perundang-undangan. Tetapi mengawal Pemilu harus dukungan dan partisipasi warga. Diseminasi literasi politik pada seluruh elemen warga menjadi faktor penentu arah demokrasi ke depan. Kontribusi penuh Kaum Milenial dan Gen Z akan mengakselerasi transformasi demokrasi. Dengan kemampuan literasi politik dimiliki setiap Kaum Milenial dan Gen Z, dapat membangun kultur dan diskursus politik yang sehat agar terciptanya sistem politik yang bermartabat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tulisan pada bagian sebelumnya, menyimpulkan terkait dengan fenomena media sosial, demografi, partisipasi politik kaum Milenial dan Gen Z dalam dinamika demokrasi, sebagai berikut : 1) Setiap negara mengalami fase krusial akibat perubahan struktur demografi yang berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Dampak perubahan dengan kemajuan teknologi informasi yang terjadi, membuat Kaum Milenial dan Gen Z sebagai bagian utama perkembangan politik dan demokrasi. 2) Media Sosial pengejawantahan ruang

publik membuka peluang Kaum Milenial dan Gen Z untuk ikut berpartisipasi membangun narasi-narasi publik. Tetapi narasinya yang dikonstruksikan bersifat apolitis sebagai bentuk kritik terhadap wacana politik dominan, 3) Politik partisipatif yang egaliter menjadi harapan Kaum Milenial dan Gen Z, dapat menentukan atau punya sikap terhadap politik dan menolak menjadi bagian dari skenario kekuasaan politik atau dijadikan sebagai komoditas politik, 4) Kaum Milenial dan Gen Z berpandangan bahwa politik masih sarat dengan kepentingan, aktor dan elit politik masih didominasi oleh kelompok konservatif dengan kerja politik yang konvensional, tidak memiliki inovasi dalam dunia perpolitikan dan hanya sekedar melanggengkan kekuasaan, 5) Kaum Milenial dan Gen Z memiliki nalar politik, tetapi bentuk peran sertanya berbeda-beda. Faktanya sebagian Kaum Milenial menjadi penggiat Pemilu dan berusaha merefleksikan pengalaman politiknya, melakukan moderasi partisipasi pengawasan, termasuk mengambil peran mengurangi resiko dan potensi kecurangan, 6) Kemampuan literasi politik dimiliki setiap warga khususnya Kaum Milenial dan Gen Z dapat membangun kultur dan diskursus politik yang sehat agar terciptanya sistem politik yang bermartabat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Althoof, Philip and Rush, Michael. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik (Terjemahan Kartini Kartono)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bachtiar, Faradiba Rahma. 2014. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Referensi. *Jurnal Politik Profetik* 3(1)
- Binarto. 1998. *Geografi Penduduk dan Demografi*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Habermas, Jurgen. 1989. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Juditha, Christiany dan Darmawan, Josep. 2018. Penggunaan Media Sosial Dan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 22(2)
- Mujani, Saiful. 2019. *Riset Consulting Tahun 2019*. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)
- Saputro, Eko Rachmat. 2022. Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Kandidat Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar Tahun 2020. *Jurnal Politik Profetik* 10(1)
- Sugiyanto, Catur. 2021. Pengaruh Struktur Umur Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 21(1)

- Syahrial, Syarbaini. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Umar, Ahmad R Mardhatillah dkk. 2014. Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena “Arab Spring” dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18(2)
- Varma, S.P. 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Yanuar, Surya Putra. 2016. Teori Perbedaan Generasi. *Among Makarti* 9(18)

Internet:

- <https://www.kompasiana.com/annakurniawati8805/610bd72c6e7f01073100e7b5/ga-gasan-jurgen-habermas-tentang-ruang-publik>
- <https://www.kompasiana.com/asrul901030/62ef69c2a51c6f170c2f1582/meningkatkan-partisipasi-ruang-publik-bagi-generasi-muda>
- <https://www.unpad.ac.id/2022/01/dua-tahun-terakhir-demokrasi-indonesia-alami-penurunan/> apabila mengutip konten berita ini.
- <https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.html>
- <https://www.unpad.ac.id/2022/01/dua-tahun-terakhir-demokrasi-indonesia-alami-penurunan>
- <https://www.krjogja.com/angkringang/read/348794/ruang-publik-virtual>